

Nama : Suerna
NPM : 2313031081
Kelas : 2023 C
Mata Kuliag : Ekonomi Pendidikan

CASE STUDY

“Reformasi Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Nusantara Raya”

Pemerintah Provinsi Nusantara Raya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Jumlah penduduk: 8 juta jiwa
- Anggaran pendidikan: 22% dari APBD
- 68% anggaran pendidikan digunakan untuk gaji dan tunjangan guru
- 12% untuk infrastruktur
- 8% untuk program bantuan siswa (beasiswa & subsidi)
- 12% untuk administrasi dan lainnya

Namun, hasil evaluasi menunjukkan:

- Skor literasi dan numerasi siswa berada di bawah rata-rata nasional
- Ketimpangan kualitas antara sekolah kota dan desa sangat tinggi
- Banyak sekolah memiliki guru berlebih di kota, tetapi kekurangan guru di daerah terpencil
- Infrastruktur digital sangat terbatas

Sebagai pembanding, pemerintah pusat ingin mendorong reformasi dengan merujuk praktik negara anggota OECD yang:

- Memiliki sistem performance-based budgeting
- Mengalokasikan dana berbasis kebutuhan siswa
- Mengutamakan peningkatan kualitas guru
- Menggunakan sistem evaluasi berbasis data

Sebagai analis ekonomi pendidikan, Anda diminta menyusun rekomendasi kebijakan dengan menjawab pertanyaan berikut:

1. Analisis Struktur Pengeluaran

- Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?
- Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa?

Jawaban:

- Belum sepenuhnya efisien. Meskipun anggaran pendidikan sudah mencapai 22% dari APBD, sebagian besar dana (68%) digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Porsi ini terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan yang saat ini masih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum diikuti oleh hasil pendidikan yang baik, karena skor literasi dan numerasi masih berada di bawah rata-rata nasional serta terjadi ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah kota dan desa.
- Bagian yang perlu direalokasi:
 1. Gaji dan tunjangan guru (68%) → diturunkan menjadi sekitar 55–60%
 - Melalui redistribusi guru dari daerah yang kelebihan guru ke daerah yang kekurangan guru.
 - Mengurangi pemborosan akibat distribusi tenaga pendidik yang tidak merata.
 2. Infrastruktur (12%) → ditingkatkan menjadi 15–18%
 - Fokus pada pembangunan jaringan internet, laboratorium komputer, dan fasilitas pembelajaran digital di daerah terpencil.
 3. Program bantuan siswa (8%) → ditingkatkan menjadi 12–15%
 - Untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu dan mengurangi kesenjangan akses pendidikan.
 4. Administrasi (12%) → diturunkan menjadi sekitar 8–10%
 - Dengan digitalisasi sistem administrasi dan pengurangan birokrasi yang tidak efisien.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

- Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?
- Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif?
Jelaskan model yang tepat!

Jawaban:

- Benar, ketergantungan yang terlalu besar pada APBD membuat ruang inovasi pembiayaan menjadi terbatas. Jika pendapatan daerah menurun, kualitas layanan pendidikan juga berpotensi terganggu.
- Perlu, namun tetap dengan pengawasan pemerintah agar tujuan pendidikan tidak bergeser menjadi orientasi keuntungan semata.
- Model pembiayaan yang tepat:
 - a. Public-Private Partnership (PPP)
Kerjasama pemerintah dengan perusahaan untuk: Penyediaan internet sekolah, Pembangunan laboratorium digital, Pengadaan perangkat komputer.
 - b. Corporate Social Responsibility (CSR)
Perusahaan dapat mendukung: Beasiswa siswa kurang mampu, pelatihan guru, penyediaan fasilitas belajar.
 - c. Education Trust Fund
Pembentukan dana abadi pendidikan daerah yang bersumber dari: APBD, Donasi masyarakat, kontribusi sektor swasta. Dana ini dapat digunakan untuk program pendidikan jangka panjang.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

- Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?
- Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?

Jawaban:

- Elemen OECD yang realistis diadopsi
 - a. Performance-Based Budgeting
Anggaran diberikan berdasarkan pencapaian indikator kinerja seperti: Tingkat literasi, tingkat numerasi, kehadiran siswa, kinerja sekolah.

b. Student-Based Funding

Dana dialokasikan berdasarkan kebutuhan siswa. Contohnya: Siswa miskin memperoleh tambahan bantuan, sekolah di daerah terpencil memperoleh dana lebih besar.

c. Peningkatan Kualitas Guru

Pada elemen ini fokus pada: Pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, pengembangan karier berbasis kinerja.

d. Data-Driven Evaluation

Pengambilan keputusan menggunakan data pendidikan secara real time sehingga kebijakan lebih tepat sasaran.

- Tantangan implementasi di Indonesia

a. Kualitas data pendidikan belum merata.

b. Infrastruktur digital di daerah terpencil masih terbatas.

c. Resistensi dari birokrasi dan sebagian tenaga pendidik terhadap perubahan sistem.

d. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem berbasis data.

e. Ketimpangan kondisi geografis antarwilayah.

4. Proposal Reformasi Pembiayaan Pendidikan 5 Tahun

Tahun 1-2: Penataan Dasar

- Perubahan Struktur Belanja

Komponen	Saat ini	Target
Gaji & Tunjangan Guru	68%	62%
Infrastruktur	12%	15%
Bantuan Siswa	8%	10%
Administrasi	12%	12%

- Program Utama

Pemetaan kebutuhan guru.

Redistribusi guru.

Redistribusi guru.

Pengembangan sistem data pendidikan terpadu.

Tahun 3-4: Transformasi Mutu

- Perubahan Struktur Belanja

Komponen	Target
Gaji & Tunjangan Guru	58%
Infrastruktur	17%
Bantuan Siswa	13%
Administrasi	12%

- Strategi Peningkatan Kualitas Guru
 - a. Pelatihan digital dan pedagogik setiap tahun.
 - b. Insentif khusus bagi guru di daerah terpencil.
 - c. Penilaian kinerja guru berbasis hasil pembelajaran.
- Digitalisasi Sekolah
 - a. Internet untuk seluruh sekolah
 - b. Platform pembelajaran daring provinsi.
 - c. Sistem absensi dan administrasi digital.
- Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - Skor literasi dan numerasi.
 - Angka partisipasi sekolah.
 - Rasio guru-siswa.
 - Akses internet sekolah.
 2. Dashboard Pendidikan Daerah
 - Menampilkan data sekolah secara real time.
 - Digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data.
 3. Evaluasi Tahunan
 - Audit penggunaan anggaran.
 - Penilaian efektivitas program.
 - Publikasi laporan kinerja kepada masyarakat.